

## **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**OLVIA OLSAN ANGREANY**  
*Universitas Tanjungpura, Indonesia*

### **ABSTRACT**

This study aims to examine and analyze the effect of local revenue and general allocation funds on the GRDP of districts and cities in West Kalimantan Province. This study also aims to examine whether the capital expenditure variable intervenes the relationship between each variable of local revenue and general allocation funds to GRDP. The data used in this study are sourced from the official publication of the Central Bureau of Statistics in the form of Regency / City Government Financial Statistics Reports. The analytical method used is *path analysis*, which aims to determine the direct and indirect effects using the SPSS version 25 program. The results show partially for the first sub-structure model that PAD has a significant effect on capital expenditure with a significance value of 0.000. <0.05. DAU has a significant effect on capital expenditure with a significance value of 0.000 <0.05. Partially for the second sub-structure model, capital expenditure has a significant effect on GRDP with a significance value of 0.000 < 0.05.

**Keywords :** *PAD, DAU, Capital Expenditures, Economic Growth*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap PDRB kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji apakah variabel belanja modal mengintervening hubungan antara masing-masing variabel pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap PDRB. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik berupa Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota. Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur (*path analysis*) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung dengan menggunakan program SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan secara parsial untuk model sub-struktur pertama bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Secara parsial untuk model sub-struktur kedua Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap PDRB dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05.

**Kata Kunci :** *PAD, DAU, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi*

## **1. PENDAHULUAN**

Otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian suatu daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi yang berlaku di Indonesia terdapat di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 yang bertujuan agar daerah mampu secara mandiri meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah. Dalam melakukan tugas dan wewenangnya Pemerintah Daerah membutuhkan anggaran guna mendukung kegiatan perekonomian. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah dari Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum.

Provinsi Kalimantan Barat memiliki PAD dan DAU yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kota Pontianak salah satu yang memberikan kontribusi paling besar terhadap PAD di provinsi Kalimantan Barat terutama di sektor pajak. Hal ini tentunya membawa dampak bagi

pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam APBD, anggaran sektor publik adalah output dari pengalokasian sumber daya yang dimana merupakan masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik. DAU merupakan dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan guna pemerataan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan komponen dari dana perimbangan yang paling berpengaruh besar terhadap kebutuhan pendanaan daerah. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan cara memperbaiki manajemen kualitas jasa, dengan upaya meminimalisasi kesenjangan antara tingkat layanan dan harapan konsumen. Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dijadikan salah satu tolak ukur untuk melihat seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah.. PDRB menggambarkan tentang pemanfaatan sumber daya-sumber daya dan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh daerah secara maksimal. Kota Pontianak memiliki jumlah PDRB tertinggi di provinsi Kalimantan Barat, hal ini didukung dengan adanya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, konstruksi dan industri pengolahan yang berpengaruh terhadap pembentukan PDRB Kota Pontianak.

## 2. KAJIAN LITERATUR

### 2.1. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Saragih (2003:55) menyatakan PAD merupakan andalan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan pembangunan. Suatu daerah dikatakan mandiri apabila PAD yang merupakan hasil dari pengelolaan sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki daerah tersebut tinggi. PAD adalah cerminan kemandirian suatu daerah. Semakin besar PAD maka daerah tersebut semakin leluasa dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakatnya (Soekarwo, 2003). Pemerintah dikatakan memiliki kinerja yang baik apabila mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan pada rancangan APBD, begitu juga sebaliknya apabila pendapatan yang diperoleh dibawah jumlah yang dianggarkan maka

### 2.2. Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan dalam pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan *block grant* yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota yang bertujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan berdasarkan prinsip tertentu dimana daerah miskin atau terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya (Kuncoro, 2014). DAU yang dialokasikan nilai minimumnya sebesar 26% dari dana APBN. DAU ditransferkan untuk daerah kabupaten dan kota sebesar 90% dan untuk provinsi sebesar 10% (Suparmoko, 2002). Faktor yang mempengaruhi banyak atau sedikitnya DAU untuk setiap daerah tergantung dari celah fiskal (*fiscal gap*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Pemberian transfer ini bertujuan untuk menjamin tercapainya standar pelayanan publik dan mengurangi kesenjangan antar daerah dan kesenjangan antara pusat dan daerah (Abdullah & Halim, 2004).

### 2.3. Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang penggunaan dan manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi. Pemerintah daerah harus mengalokasikan belanja modal lebih tinggi dari belanja rutin yang relatif kurang produktif (Felix, 2012). Tetapi pada kenyataannya, masih banyak daerah yang pengeluaran belanja modalnya lebih rendah dibanding dengan belanja pegawai. Menurut Halim & Abdullah (2006:19) pengalokasian Belanja Modal disesuaikan dengan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Menurut Abdullah & Nazry (2015) ketika pemerintah daerah menganggarkan belanja cenderung mengusulkan jumlah dan kebutuhan yang sesungguhnya. Pemerintah daerah cenderung mengusulkan besaran alokasi anggaran melebihi *real cost* saat anggaran itu disusun.

#### 2.4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang dan jasa kepada penduduknya, kemampuan ini bertambah sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan. Menurut E. Kwan Choi dan Hamid Beladi dalam Todaro (2004), sumber utama dari pertumbuhan ekonomi adalah adanya investasi-investasi yang mampu memperbaiki kualitas modal atau sumberdaya manusia dan fisik, yang selanjutnya akan meningkatkan kuantitas sumber daya melalui penemuan-penemuan baru, inovasi dan kemajuan teknologi. Kegiatan investasi memungkinkan dapat meningkatkan pendapatan nasional serta memberikan kesempatan kerja yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2000).

Keynes menyatakan cara terbaik untuk mengeluarkan suatu negara dari kondisi resesi (permintaan dan penawaran di bawah kapasitas optimal) adalah dengan melibatkan pemerintah guna mendorong kembali posisi permintaan dan penawaran dalam pasar melalui kebijakan belanja dan investasi. Pemerintah juga harus mengambil peranan dalam menyediakan barang-barang publik, sehingga tentunya membutuhkan sumber-sumber penerimaan. Kebijakan terkait pengeluaran dan penerimaan pemerintah inilah yang disebut dengan kebijakan fiskal. Harrod dan Domar mengatakan bahwa peran investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat penting. Investasi sendiri memiliki dua peran sekaligus yaitu disisi permintaan, investasi sebagai faktor yang dapat menciptakan pendapatan dan disisi penawaran, investasi dapat memperbesar kapasitas produksi dengan meningkatkan stok modal. Dalam jangka panjang, pengeluaran investasi tidak hanya mempengaruhi permintaan agregatif, namun juga mempengaruhi penawaran agregatif melalui perubahan kapasitas produksi.

#### **Hubungan PAD terhadap Belanja Modal**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber penerimaan yang berasal dari hasil pengelolaan sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki daerah. Daerah dengan sumber daya alam yang besar serta didukung sarana dan prasarana yang memadai akan berpengaruh pada naiknya tingkat produktivitas dan menarik investasi untuk masuk yang pada akhirnya diharapkan dapat menambah PAD. Peningkatan PAD yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Dengan meningkatnya investasi melalui belanja modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap pembangunan

yang tercermin dari adanya peningkatan jumlah PAD (Mardiasmo, 2002). Dengan kata lain, upaya peningkatan pembangunan fasilitas publik akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan daerah. Dengan demikian, diharapkan PAD dapat meningkatkan investasi belanja modal sehingga Pemerintah Daerah dapat memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Apabila PAD disuatu daerah semakin besar maka pengeluaran untuk belanjanya juga semakin besar, begitupun sebaliknya apabila PAD tersebut rendah maka pengeluaran untuk belanjanya pun juga rendah (Halim, 2001).

*H1: PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.*

### **Hubungan DAU terhadap Belanja Modal**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan dalam pelaksanaan desentralisasi. Abdullah & Halim (2004) menyatakan DAU berpengaruh terhadap belanja modal dan apabila terjadi pengurangan jumlah dana transfer dapat menyebabkan penurunan dalam pengeluaran belanja modal. Holtz-Eakin et al dalam Harianto & Adi (2007) menyatakan bahwa “terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal”. Gamkhar dan Oates dalam Maimunah (2006:5) , pengurangan jumlah transfer oleh pemerintah pusat menyebabkan penurunan pada pengeluaran daerah. Sebagian besar daerah tidak mampu mengandalkan PAD untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya, sehingga harus mendapat dana transfer oleh pemerintah pusat berupa DAU untuk membiayai pengeluaran daerah (Saragih 2003:57).

*H2: DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.*

### **Hubungan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.**

Menurut Keynesian, pengeluaran pemerintah yang meningkat akan meningkatkan produksi sehingga mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi (Jahan, Mahmud, & Papageorgiou, 2014). Dalam pandangan *Wagner Laws* atau hukum Wagner menyatakan bahwa jika pertumbuhan ekonomi di suatu daerah meningkat maka pemerintah akan meningkatkan belanja modal untuk membangun dan melengkapi sarana dan prasarana dan pelayanan publik agar mencapai kesejahteraan dalam masyarakat (Salih, 2012). Sahoo et al. (2010) menyelidiki peran infrastruktur dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi di China periode 1975 sampai 2007. Secara keseluruhan, menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur, angkatan kerja, investasi publik dan swasta telah memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di China. Lebih lagi bahwa pembangunan infrastruktur di China memiliki kontribusi positif dan signifikan terhadap pertumbuhan investasi swasta dan publik. Selanjutnya, ada hubungan kausal searah antara pembangunan infrastruktur hingga pertumbuhan *output* yang membenarkan pengeluaran tinggi di China untuk pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur di China inilah merupakan salah satu contoh pengeluaran belanja publik yang merupakan bagian dari belanja modal.

## **3. METODE PENELITIAN**

### **3.1. Jenis Penelitian, Sumber Data, Populasi dan Sampel**

Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/ Kota tahun 2011-2017 di Provinsi Kalimantan Barat yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Pendapatan Domestik Regional Bruto. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Dengan sampel Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah

Kabupaten/Kota dan PDRB Kabupaten/Kota Atas Dasar Harga Konstan untuk 12 kabupaten dan 2 kota di Provinsi Kalimantan Barat.

### 3.2. Variabel Penelitian

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.** Variabel dan Pengukuran

Variabel	Indikator	Skala Ukur	Keterangan
Pendapatan Asli Daerah	Jumlah PAD	Rasio	Variabel Eksogen
Dana Alokasi Umum	Jumlah DAU	Rasio	Variabel Eksogen
Belanja Modal	Jumlah Belanja Modal	Rasio	Variabel Intervening
Pertumbuhan Ekonomi	PDRB Harga Konstan	Rasio	Variabel Endogen

### 3.3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *path analysis* dengan menggunakan program *Statistical Product and Service Solution (SPSS) versi 25*. Tahap analisis yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu, uji asumsi klasik, perumusan model *Path Analysis*, dan uji hipotesis. Persamaan jalur untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y1 = \rho Y1X1 + \rho Y1X2 + e_1 \dots \quad (\text{Model Sub-struktur 1})$$

$$Y2 = \rho Y2Y1 + e_2 \dots \quad (\text{Model Sub-struktur 2})$$

Keterangan :

X1 = Pendapatan Asli Daerah

X2 = Dana Alokasi Umum

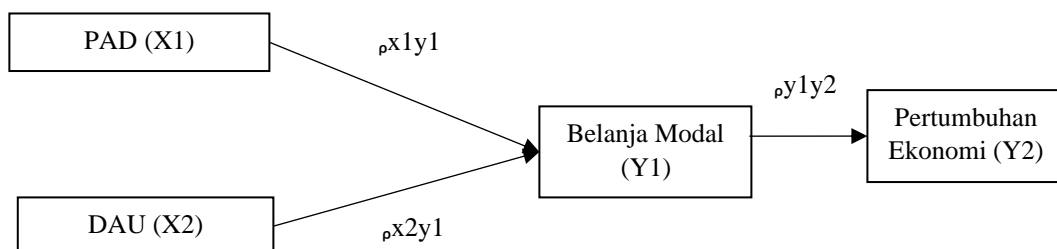
Y1 = Belanja Modal

Y2 = Pertumbuhan Ekonomi

$\rho$  = Koefisien Path

e = error/tingkat kesalahan

**Gambar 1.** Kerangka Analisis



## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum model digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Dalam analisis jalur, ada empat asumsi yang harus dipenuhi yaitu asumsi normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa semua asumsi terpenuhi. Tabel 2 dan Tabel 3 masing-masing menyajikan simpulan hasil uji statistik model pertama dan kedua terkait dengan hipotesis yang diuji dalam penelitian.

**Tabel 2.** Hasil Uji Hipotesis Model Sub Struktur 1

Model	Coef (Path)	t	Sig.
1   PAD (X1)	0,329	4,805	0,000
DAU (X2)	0,459	5,634	0,000
R2 = 0,566			
F Hitung = 61, 942			
Sig. F = 0,000			

### Analisis Model Sub Struktur 1

Hasil pengujian model pertama menunjukkan bahwa secara simultan PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan signifikansi dibawah 0,05 ( $p=0,000$ ), dan koefesien nilai R2 sebesar 0,566 atau dibulatkan menjadi 56,6% , yang berarti bahwa Belanja Modal dipengaruhi oleh variabel-variabel yang diobservasi sebesar 56,6%. Sisanya, 43,4% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Berdasarkan nilai koefesien jalurnya,  $\rho_{x_1y_1}=0,329$  dan  $\rho_{x_2y_1}=0,459$  serta sig  $>0,000$  pada jalur X1, sig  $>0,000$  pada jalur X2. Hal ini berarti secara parsial pun PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Selanjutnya pengaruh kausal empiris antara variabel (X1) dan (X2) tersebut dapat digambarkan melalui persamaan sub struktural 1 :

$$Y_1 = 0,392 X_1 + 0,459 X_2 + 0,658e_1$$

**Tabel 3.** Hasil Uji Hipotesis Model Sub Struktur 2

Model	Coef (Path)	t	Sig.
1   Belanja Modal (Y1)	0,529	6,115	0,000
R2 = 0,280			
F Hitung = 37,393			
Sig. F = 0,000			

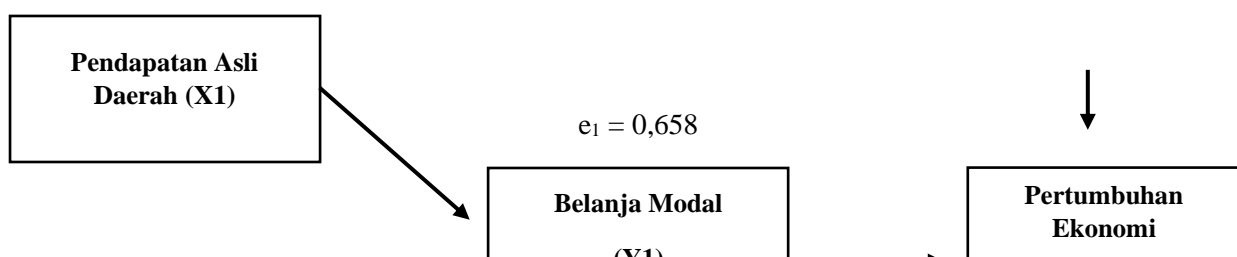
### Analisis Model Sub Struktur 2

Hasil pengujian model kedua menunjukkan bahwa secara simultan Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan signifikansi dibawah 0,05 ( $p=0,000$ ), dan koefesien nilai R2 sebesar 0,280 atau dibulatkan menjadi 28% , yang berarti bahwa Pertumbuhan Ekonomi dipengaruhi oleh variabel-variabel yang diobservasi sebesar 28%. Sisanya, 72% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Berdasarkan nilai koefesien jalurnya,  $\rho_{y_1y_2}=0,529$  serta sig  $>0,000$  pada jalur Y1. Hal ini berarti secara parsial pun Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Selanjutnya pengaruh kausal empiris antara variabel (Y1) tersebut dapat digambarkan melalui persamaan sub struktural 2 :

$$Y_2 = 0,529 Y_1 + 0,848e_2$$

Berdasarkan analisis dan persamaan diatas, maka dapat diperoleh diagram model penelitian sebagai berikut:

**Gambar 2.** Diagram Model Hasil Analisis Jalur



0,329

$e_2 = 0,848$

0,529

0,459

## **Pengujian Hipotesis dan Pembahasan**

### **1. Pengaruh PAD Terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama diketahui bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini berdasarkan nilai koefisien jalur X1 (PAD) yaitu sebesar 0,329 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis pertama yaitu PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal terbukti. Hasil penelitian ini bertentangan dengan Mentayani dan Rusmanto (2013) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal sehingga dapat diartikan bahwa PAD yang diperoleh dari kegiatan ekonomi daerah tersebut tinggi, berarti Belanja Modal yang dikeluarkan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana tersebut juga tinggi. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesa awal yang diajukan, dimana PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal tersebut dapat terjadi karena PAD digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana daerah. Besarnya PAD di suatu daerah menandai bahwa daerah tersebut mandiri dalam hal membiayai pembangunan daerah jika pengelolaannya dilakukan secara baik.

### **2. Pengaruh DAU Terhadap Belanja Modal**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua diketahui bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal daerah Kabupaten / Kota di provinsi Kalimantan Barat. Hal ini berdasarkan nilai koefisien jalur X2 (DAU) yaitu sebesar 0,459 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis kedua yaitu DAU berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal terbukti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal sehingga dapat diartikan bahwa semakin besar DAU yang diterima oleh suatu daerah, maka akan semakin besar pula pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana dalam bentuk Belanja Modal. Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan antara Pusat dan Daerah telah diatasi dengan adanya transfer dana perimbangan dari Pusat ke Daerah salah satunya adalah Dana Alokasi Umum minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri. Kebutuhan akan DAU oleh suatu daerah ditentukan oleh kebutuhan fiskal dan potensi daerah, sehingga DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah.

### **3. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga diketahui bahwa Belanja Modal daerah berpengaruh signifikan terhadap PDRB daerah Kabupaten / Kota di provinsi Kalimantan Barat. Hal ini berdasarkan nilai koefisien jalur Y1 (Belanja Modal) yaitu sebesar 0,529 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis ketiga yaitu Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap pada PDRB terbukti.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesa awal dan menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap PDRB sehingga dapat diartikan pembiayaan yang dikeluarkan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana melalui Belanja Modal besar, berarti PDRB yang diperoleh daerah tersebut meningkat. Hal ini dikarenakan tepatnya pengalokasian Belanja Modal tersebut. Kebijakan pengeluaran Belanja Modal dalam bentuk pembelian barang dan jasa, mampu mendorong peningkatan permintaan produksi dalam perekonomian daerah yang ada di provinsi Kalimantan Barat.

## **5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil analisis jalur substruktur pertama PAD dan DAU mempengaruhi Belanja Modal secara signifikan. Dan analisis jalur substruktur kedua Belanja Modal mempengaruhi PDRB kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun saran berdasarkan kesimpulan yang telah diambil adalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di provinsi Kalimantan Barat dalam mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah ke dalam Belanja Modal karena manfaat dan kegunaan Belanja Modal berkaitan dengan peningkatan PDRB kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Semakin besar kebutuhan fiskal daerah untuk memenuhi pelayanan publik, maka Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah sebagai bentuk perwujudan kemandirian fiskal.



## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, S., & Nazry, R. (2015). Analisis Varian Anggaran Pemerintah Daerah Penjelasan Empiris dari Perspektif Keagenan. *Jurnal Samudera Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 272-283.
- Badan Pusat Statistik. 2013-2017. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Ernita., Dewi., Amar, S., & Syofyan, E.(2013). Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Konsumsi di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 15(2).
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Lisandri., Rizani, F., & Syam, A. Y. (2017). Pengaruh PAD dan DAU Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, *Jurnal Spread*, 7(2), 111-122.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Sahoo, P., Dash, R. K., & Nataraj, G. (2010) Infrastructure Development and Economic Growth in China. *Institute of Developing Economic (IDE)*. Discussion Paper No.261.
- Siagian, E. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi D.I. Yogyakarta Tahun 2010-2016*, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2003). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Uhise, S. (2013). Dana Alokasi Umum (DAU) Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening, *Jurnal EMBA*, 1(4), 1677-1686.